

Target Tol Pesimistis Dicapai

MIMPI JALAN TOL 5.405 KM

Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 km di seluruh Indonesia. Namun, kalangan swasta pesimistis target itu bisa dicapai jika kendala-kendala yang ada belum teratasi.

JAKARTA—Kalangan swasta tak yakin pemerintah bisa memenuhi target pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 kilometer di seluruh Indonesia.

Selain masalah pembebasan lahan dan anggaran, benturan peraturan antara kementerian dan lembaga terkait pun masih sering terjadi dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dinilai belum bisa menuntaskan masalah-masalah tersebut.

"Saya kok pesimis ya. Kenapa, karena dari dulu targetnya besar-besar, namun pada akhirnya barubisa selesai bertahun-tahun," kata Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fathur Rochman saat dihubungi *KORAN SINDO*, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, target pemerintah terlalu berlebihan karena tidak diimbangi jangka waktu penyelesaian. Dia mengatakan, ada banyak kasus di mana pemerintah baru bisa menyelesaikan jalan tol hingga bertahun-tahun, seperti proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta/ Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dirancang sejak tahun 1990-an, yang hingga sekarang belum rampung 100%.

"Artinya, JORR ini saja belum tersambung semua. Jadi, gimana caranya mau menargetkan pembangunan tanpa batas waktu penyelesaian," ucapnya.

Fathur mengungkapkan, kalangan swasta telah berkali-kali mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek pembangunan jalan tol. Namun, upaya itu terus tersandung pada masalah pembebasan lahan, yang penyelesaiannya notabene merupakan tugas negara. "Ini bukan soal anggaran saja. Tapi ada benturan peraturan, baik itu

yang ada di daerah atau lembaga terkait. Misalnya, ketika lahan itu milik negara mau dibangun tol, harus berurusan dengan Badan Pertanahan Nasional. Dan perizinan seperti itu juga butuh waktu," paparnya.

Masalah pembebasan lahan memang menjadi kendala utama proyek infrastruktur di Indonesia, karena ketika beredar informasi di satu titik akan ada proyek infrastruktur, harga lahan lantas melambung berkali lipat. Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan pemerintah namun belum bersinergi di lapangan. "Ada banyak solusi, cuma belum ada kemauan saja dari stakeholder terkait untuk menyelesaikannya. Ini yang saya kira menghambat. Padahal, infrastruktur itu akses pertumbuhan kita," cetusnya.

Target pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 km di seluruh Indonesia diungkapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR kemarin. Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan, panjang jalan tol yang sedang dalam tahap pembangunan atau masuk ke dalam program pemerintah saat ini mencapai 1.089 km, dan sebanyak 534 km di antaranya akan menjadi prioritas. Di sisi lain jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi saat ini baru mencapai 774 km.

"Masalah pembebasan la-

han ini memang menjadi kendala dan tak bisa diprediksi waktu penyelesaiannya. Masalahnya juga berbeda antara satu dan yang lain, sehingga diperlukan perhatian semua pihak," ujar dia dalam rapat tersebut.

Revisi Perpres Pembebasan Lahan

Menyikapi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan Peraturan

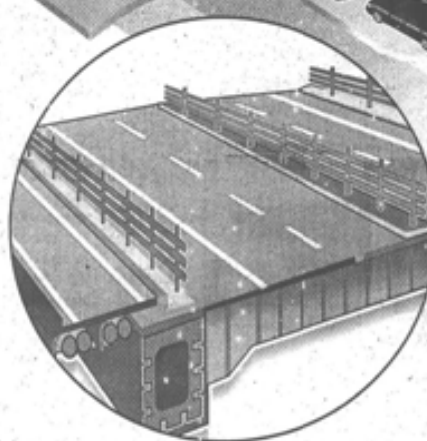
- Total panjang jalan tol yang dalam tahap pembangunan/ masuk dalam program Pemerintah: 1.089 km
- Total panjang proyek tol prioritas: 534 km
- Total panjang jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi: 774 km

Kendala:

- Pembebasan lahan
- Koordinasi antarinstansi terkait
- Keekonomian proyek

Sumber pembiayaan

- 1 Penyertaan Modal Negara (PMN)
- 2 Pinjaman dan penerbitan obligasi
- 3 Pembiayaan dari luar negeri



Sumber: Berbagai data, diolah

garkan di APBN," kata Ketua Komite Tetap bidang Pengembangan Pelatihan Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Bambang Suroso sesuai rapat kerja Kadin bidang Infrastruktur, di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Kadin mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pusat Perizinan Terpadu, segera bersinergi dengan membentuk unit khusus untuk bisa segera membebaskan tanah dengan aturan lama sebelum Desember 2014. Dengan begitu, diharapkan proses pembebasan lahan dapat berlangsung secara pasti dan terprogram. Pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang belum memiliki kelayakan.

● **ichsanamin/akhmad nurhuda**

Presiden (Perpres) No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum direvisi supaya lebih aplikatif. Salah satunya mengenai anggaran pembebasan tanah yang dialokasikan di APBN. Perpres tersebut hanya berlaku untuk proyek-proyek baru, sedangkan proyek lama tidak tersentuh.

"Proyek-proyek yang saat ini sedang berproses tapi tidak jalan, seperti 24 ruas jalan tol kami dorong juga supaya diang-